

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, Pemerintah melakukan intensifikasi dan eskstensifikasi pajak yang salah satunya ditempuh dengan kebijakan pengampunan pajak. Keberlakuan pengampunan pajak sendiri masih pro dan kontra di tengah masyarakat. Pengampunan pajak seakan-akan mengesampingkan penegakan hukum demi penerimaan negara dari dana-dana yang tidak atau belum diungkapkan wajib pajak. Pada hakekatnya, pengampunan pajak tidak menghapuskan penegakan hukum pajak di Indonesia tetapi pengampunan pajak semakin menguatkan penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, pengampunan pajak ini dapat memperluas basis data perpajakan yang lebih valid.

Kata Kunci : Pajak, Pengampunan Pajak, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Taxation was the largest national income sources in Indonesia. To increasing the national income from taxation sector, intensification and extensification on taxes are pursue by government with the regulation on tax amnesty policy. The debating of enforcement tax amnesty still has pros and cons in society, because tax amnesty seemed neglect the law enforcement of unpublished or unreported funds for the sake of increasing the national income. Essentially, tax amnesty later *doesn't eliminate law enforcement on tax at all in Indonesia, but* strengthens law enforcement itself. Furthermore, tax amnesty later can broaden the valid data base of taxes in Indonesia.

Keywords: Tax, Tax Amnesty, Law Enforcement.